

**PENETAPAN UPAH MEMANEN PADI DIBAGI DELAPAN DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten
Tulang Bawang)**

Sripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

RITA FARIHAH

NPM: 1621030520

Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat desa Wono Agung yang mayoritas pekerjaannya adalah petani. Karena banyaknya lahan pertanian yang menjadikan desa Wono Agung menjadi desa maju akan pertaniannya. Dalam pemanenan padi di desa Wono Agung, terdapat perjanjian Akad yang digunakan dalam perjanjian pemanenan padi di bagi delapan yang menggunakan akad *ijarah* yaitu perjanjian pengupahan pemanenan padi untuk memanen hasil pertanian berdasarkan pada hasil yang didapat, yaitu mendapatkan 7:1 dari hasil yang didapat untuk pengupahan. 7 (tujuh) bagian untuk pemilik lahan atau petani, 1 (satu) bagian untuk pemanenan padi sebagai pembayaran upah (*ujrah*) atas jasa yang dilakukannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik penetapan upah memanen padi di bagi delapan di Desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang dan Bagaimana penetapan upah pemanenan padi di bagi delapan dalam tinjauan hukum Islam di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penetapan upah memanen padi dibagi delapan di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. Dan Untuk mengetahui penetapan upah pemanenan padi dibagi delapan dalam tinjauan hukum Islam di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

Jenis penelitian termasuk penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu suatu penelitian yang mengumpulkan datanya yang diperoleh dari lapangan. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari data responden yang terdiri dari pemilik lahan dan pemanenan. Untuk mendapatkan data yang valid penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang ada pada perpustakaan.

Adapun hasil penelitian dalam praktik penetapan upah memanen padi dibagi delapan di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Yaitu pembayaran upah diberikan ketika pemanenan padi telah selesai dilakukan dan mengetahui hasil dari pemanenan padi. Pembagian dalam penetapan upah memanen padi dibagi delapan ini memiliki unsur yang jelas maka penetapan upah pemanenan padi dibagi delapan ini diperbolehkan, karena dalam perjanjian penetapan upahnya sudah sesuai dengan syarat dan rukun upah-mengupah dalam hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rita Farihah
Npm : 1621030520
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penetapan Upah MengananPadi di Bagi Delapan Dalam Tinjauan Hukum Islam (study di Desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 25 Desember 2020

Rita Farihah
NPM. 1621030520



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Sukarame JL. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Rita Fariyah
Npm : 1621030520
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Penetapan Upah Menganan Padi dibagi
Delapan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi
di Desa Wono Agung. Kecamatan
Rawajitu. Selatan. Kabupaten Tulang Bawang.

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Khoiruddin, M.H

NIP. 196210221993031002

Pembimbing II

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Sukarame JL. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Penetapan Upah Memanen Padi dibagi Delapan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang) disusun oleh Rita Fariyah NPM: 1621030520, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: 11 Januari 2021

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Fathul Mu'in, M.H.I. (.....)

Penguji Utama: Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H (.....)

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I. (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
196210221993031002

MOTTO

مِمنُ الْقَوِيُّ اسْتَجَرْتُ مِنْ خَيْرِ اَبْنِ اسْتَجِرْهُ يَتَابِتْ اِحَدَهُمَا قَالَتْ
تَاْجُرْنِي اَنْ عَلَيَّ هَتَيْنِ ابْنَتِيْ اِحَدَى اُنْكِحَكَ اَنْ اُرِيْدُ اِنِّيْ قَالَتْ ۝ اَلَا
عَلَيْكَ اَشُقُّ اَنْ اُرِيْدُ وَمَا عِنْدَكَ فَمِنْ عَشْرًا اَتَمَمْتَ فَاِنْ حَجَجْتَ ثَمَنِيْ
۝ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ ۚ اَللّٰهُ شَآءَ اِنْ سَتَجِدُنِيْ ۚ

Artinya: Salah seorang dari wanita itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia sebagai oarang yang bekerja (padakita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’aib): “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini. Atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan bila kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberatikamu. Dan kamu insyaallah akan mendapatiku orang-orang yang baik.

PERSEMBAHAN

Bismillahirtahmanirrahim.

Dengan penuh Rasa Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya maka akan saya persembahkan karya ilmiah skripsi ini teruntuk :

1. Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda Awan Ridwan dan Ibu Imas Maysroh yang telah mencurahkan kasih sayangnya, perhatian, kesabaran, dan selalu memberikan semangat serta tak pernah lelah mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya sejak kecil hingga sekarang. semoga kelak anakmu ini bisa menjadi anak yang shalehah dan membanggakan untuk kalian berdua dan semoga Allah selalu mengabulkan doa-doa dan memuliakan kalian berdua di dunia dan akhirat. *Aamiin Yarobbal Alamin.*
2. Kakak perempuanku Umi Kulsum SPd. dan Ai Rubaiah. SPdterimakasih atas semua do'anya dan nasehat serta motivasi sehingga karya ini bisa terselesaikan, dan semoga menjadi ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk saya dan semua. *Aamiin.*

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Rita Farihah merupakan penulis dari skripsi ini, adalah anak dari pasangan Bapak Awan Ridwan dan Ibu Imas Maysroh. Lahir di Bandung 25 Desember tahun 1997. Anak ke 3 dari 3 bersaudara yaitu Umi Kulsum Dan Ai Rubaiah

Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan dimulai dari TK ABA di gedungaji Baru, Kabupaten Tulang Bawang
2. Pendidikan SDN01 Gedungaji Baru.Kabupaten Tulang Bawang, lulus pada tahun 2010.
3. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah di Pesantren Usuludin lampung Selatan selama 6 bulan dan melanjutkan di SMPN 01 Gedungaji Baru kabupaten Tulang Bawang, selesai pada tahun 2014.
4. Sekolah menengah atas di MAN 01 Model Bandar Lampung selesai pada tahun 2016.
5. Dan pada tahun 2016 hingga saat ini sedang Menempuh pendidikan S1 Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan berjudul **“Penetapan Upah memanen Padi diagi Delapan Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi Kasus di Desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang ilmu Syari'ah (S.H.).

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, material dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh., Mukri. M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan juga selaku pembimbing I yang telah memberikan motivasi dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan informasi dan data referensi.
5. Serta sahabat-sahabat seperjuangan dalam menuntut ilmu di UIN Raden Intan Lampung, Riza Afrilia, Enggar Devian, Fatimah Nurillah, dan saudaraku yang tersayang Eva Rosmayanti.

Akhirnya diharapkan betapapun karya tulis ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah.

Wasalamu'alaikum, Wr, Wb.

Bandar Lampung, 25 Desember 2020
Penulis

Rita Farihah
NPM. 1621030520



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus penelitian.....	6
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikansi Penelitian	7
H. Metode Penelitian	8

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	13
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	16
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	20
4. Prinsip-Prinsip <i>Ijarah</i>	22
5. Macam-macam <i>Ijarah</i>	24
6. Ragam Akad <i>Ijarah</i>	25
7. Cara Menentukan <i>Ujrah</i>	23
8. Pembayaran <i>Ijarah</i>	27
9. Pembayaran <i>Ijarah</i> Dalam Prespektif Hukum Islam	29
10. Mahal Al-Manfaah dan Cara Pemanfaatanya	33
11. Hak Dan Kewajiban Pekerja.....	40

12. Berakhirnya <i>Ujrah</i>	41
B. Tinjauan Pustaka.....	41

BAB III:LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang	45
1. Sejarah Berdirinya Desa Wono Agung	45
2. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Wono Agung.....	47
3. Kondisi Pertanian Masyarakat Desa Wono Agung.....	49
B. Penetapan upah hasil Memanen Padi di Bagi delapan di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang.....	50

BAB IV : ANALISA DATA

A. Praktek penetapan upah Memanen padi di Bagi delapan di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang	63
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan upah hasil panen padi dengan sistem bagi delapan di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1. Jumlah Penduduk Desa Wono Agung Menurut Kelompok Menurut Jenis kelamin pada tahun 2019	45
2. Jumlah Penduduk Desa Wono Agung Menurut Kelompok Usia	45
3. Jumlah Penduduk Desa Wono Agung Menurut Pekerjaan.....	46
4. Jumlah Pertanian Menurut Jenis Tanaman	47
5. Daftar Nama Informan selaku pemilik lahan pertanian dalam peraktek pengupahan panen padi dengan sistem bagi delapan di desa Wono Agung, kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang bawang	52
6. Daftar nama informan selaku pemilik alat (<i>combine havester</i>) atau pemanen padi dengan sistem bagi delapan di desa Wono Agung, kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang.....	56

DAFTAR GAMBAR

1. Ragam <i>Ijarah</i>	22
2. Struktur Keorganisasian Desa Wono Agung, Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten tulang Bawang.....	43
3. Persentase Alasan konsumenMemilih memanen padi dengan sistem bagi delapan	54
4. Persentase jumlah pemanen padi memilih menggunakan Sistem bagi delapan.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Keterangan Wawancara dengan Informan Penelitian
4. Hasil Turnitin Skripsi
5. Blangko Konsumen Skripsi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Penetapan Upah Menganan Padi dibagi Delapan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang) Adapun Istilah-istilah Yang terdapat dalam judul tersebut perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan dalam KBBI adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan.¹
2. Upah adalah menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti, menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan dibayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.²
3. Menganan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kegiatan mengambil, memetik, memungut hasil tanaman sebagai tanda berakhirnya kegiatan pada sebuah lahan pertanian atau perkebunan.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 988

² A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (IAIN Raden Intan Lampung 2015), h. 187.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*..., h. 1263.

4. Dibagi Delapan adalah penetapan upah yang ditetapkan oleh orang yang melakukan jasa untuk suatu pekerjaan atau orang yang memanen padi.
5. Tinjauan, ialah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁴
6. Hukum Islam, adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul untuk mengatur tingkah lakunya manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa judul dari skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk meninjau secara tegas terhadap praktik penetapan upah memanen padi di bagi delapan di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang bawang dengan menggunakan hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-

alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah :

1. Alasan Objektif

karena penulis ingin mengetahui bagaimana penetapan upah memanen padi di bagi delapan dalam tinjauan hukum Islam.

2. Alasan Subjektif,

a. Ditinjau dari bahasan, maka penelitian ini

ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Balai Pustaka, 1990), h.1198.

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Cetakan ke Satu, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h.5.

- b. Sejauh yang penulis ketahui, permasalahan ini belum pernah dibahas dalam judul skripsi di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- c. maka penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Muamalah Fakultas Syari'ah, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak, di dalamnya terdapat petunjuk dari Allah SWT dan Rasul-Nya tentang seharusnya bagaimana manusia menyikapi hidup dan kehidupan secara lebih bermakna, bermoral, dan sejalan dengan ajaran islam, untuk mewujudkan Islam sebagai satu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Umat Islam telah selesai menunaikan sholat yang diperintahkan Allah untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh keuntungannya, seperti ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan dan lain-lain.


Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Secara narulilah, manusia saling tolong menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama.

Hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya

yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqh muamalah.⁶

Umat Islam diperintahkan oleh agamanya agar giat berusaha atau berkerja sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti berkerja keras untuk berusaha mencari rekekisebagai karunia Allah SWT. Tentunya pekerjaan yang dikerjakan adalah yang baik dan halal dan mendapatkan hasil atau upah dengan jalan yang halal pula.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Quran surah al-Baqorah ayat 233 yaitu:



وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah (2) : 233).⁷

Yang menjadi dalil ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” ungkapan tersebut menunjukan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.⁸

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h.1.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor, 2007) h. 37

⁸.Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke praktek*, (Jakarta: PT. Gema Insani 2001), h 118

Hadis riwayat ibn Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَرَ قَعَهُ.

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR Ibnu Majah).⁹

Dalam Islam, upah mengupah dapat diistilahkan dengan *ijarah*, menurut pengertian syara *ijarah* ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa atau jasa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁰

Ijarah sendiri disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud “manfaat” adalah berguna. Yaitu barang yang dapat diambil manfaatnya atau berguna yang barang itu tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak zatnya melainkan sifatnya dan dibayar sewa misalnya membayar rumah kontrakan yang di sewa dan membayar atas jasa misalnya pekerja patani.¹¹

Pemanenan padi pada awalnya dilakukan dengan sistem manual, yaitu dengan menggunakan tenaga manusia. Pemanenan padi dengan manual ini

⁹Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale And Lease Back*. h. 1.

¹⁰Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqih (Jakarta: Amzah, 2013), h.87.

¹¹Muhammad, *Managemen keuangan syariah Analisis fiqih dan keuangan* (yogyakarta: UPP YKPM, 2014), h. 309.

menggunakan pengupahan bagi sepuluh. Pembagian hasilnya yaitu 8:2, yang dimana petani mendapatkan 8 bagian dan pemanen padi mendapatkan 2 bagian sebagai upah atas jasa yang diberikan.

Seiring berkembangnya teknologi pemanenan padi menggunakan alat canggih yaitu alat *combine harvester*, dan Penetapan upah memanen padi pun berubah menjadi dibagi delapan. Dengan pembagiaan keuntungan 7:1 yaitu petani mendapatkan 7 bagian dari hasil pemanenan dan 1 bagian untuk upah atas jasa yang diberikan oleh pemanen padi.

Penetapan upah manen padi dibagi delapan yang menentukan pengupahan yaitu pihak yang diberikan pekerjaan atau pemanen padi, berapapun besar atau kecil hasil panen padi yang didapat oleh pemilik lahan, semua hasil panen harus dibagi delapan. Setelah semua hasil panen dibagi delapan.

Combine havrester adalah mesin yang digunakan untuk memanen padi, fungsi mesin ini seperti namanya kombinasi dari tiga oprasi yang berbeda yaitu Menuai, merontokandan menampi dijadikan satu rangkaian oprasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih dalam mengenai:“ **Penetapan Upah memanen Padi dibagi Delapan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan.Kabupaten Tulang Bawang).**

D. FokusPenelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dari pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang

menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah “penetapan upah memanen padi dibagi delapan dalam tinjauan hukum Islam” yang terjadi di Desa Wono Agung kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penetapan upah memanen padi dibagi delapan di Desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana penetapan upah memanen padi dibagi delapan dalam tinjauan hukum Islam di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penetapan upah memanen padi dibagi delapan di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui penetapan upah memanen padi dibagi delapan dalam tinjauan hukum Islam di Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Penetapan Upah memanen padi dibagi delapan dalam tinjauan hukum Islam di desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

2. Secara Praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, masyarakat, konsumen, sertapihak pihak lain di Indonesia mengenai penetapan upah memanen dibagi delapan dalam tinjauan hukum Islam. Dan hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan suatu kegiatan atau cara ilmiah yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹²

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk

¹²Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2013), h. 19.

mendapatkan data yang diperlukan dan berusaha memaparkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu. Oleh karena itu, data yang diperoleh akan dideskripsikan dan dianalisis secara bertahap. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana penetapan upah memanen padi dibagi delapan

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data yang diperoleh atau bersumber langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang diperoleh dari penetapan upah memanen padi dibagi delapan dalam tinjauan hukum Islam di Desa Wono Agung kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan riset, yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua yang melakukan pemanenan padi dibagi delapan ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.¹³ Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 232 orang yang terdiri dari pemilik lahan pertanian atau petani yang berjumlah 220 orang dan yang mempunyai alat pemanen padi atau pemanen 12 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diambil dan diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Sebaliknya apabila subjeknya lebih besar dari 100, dapat diambil antara 10%-15% dari populasi.¹⁴ Karena populasi di dalam penelitian berjumlah 232 orang. penulis mengambil sampel sebanyak 10% dari populasi. Maka $232 \times 10\% = 23$ orang. Maka sampel dari populasi penelitiann ini adalah 23 orang Terdiri dari 7 orang pemanen dan 16

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 173.

¹⁴ *Ibid.* h. 174

orang pemilik lahansi Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. Penggunaan sampel yaitu menggunakan *random sampling*. Semua sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).¹⁵

Wawancara dengan pemilik lahan pertanian dan pemanen.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan untuk mencari data mengenai suatu hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah ataupun keadaan Desa Wono Agung. Adapun yang dimaksud dengan disini adalah suatu data yang berkaitan dengan data lapangan.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka diolah secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

¹⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 120.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai (relevan) dengan masalah.
- b. Coding Pemberiaan tanda kata yang diperoleh berupa penomoran atau penggunaan tanda atau simbol kata tertentu yang menunjukkan kelompok atau golongan tertentu atau klasifikasi berdasarkan jenisnya.
- c. *Sistematising* adalah melakukan pengecekan data/bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh

6. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif. Data-data yang diperoleh sebagai data lama dianalisa menggunakan metode dan teori upah mengupah. Secara bertahap, sejak awal pengumpulan data dan dilanjutkan dengan analisa berlapis. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang sudah dirumuskan dalam sistematika pembahasan. Penelitian, untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian *Ijarah*

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab yaitu upah, jasa, sewa, imbalan atau jual beli manfaat. *Al-ijarah* merupakan bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, atau upah atas jasa yang diberikan dan lain-lain¹

Ijarah menurut bahasa adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut istilah berarti melakukan akad dengan mengambil manfaat sesuatu yang diterima atau di dapat dari orang lain dengan jalan membayar sesuai perjanjian yang telah di sepakati dan di tentukan dengan syarat-syarat tertentu pula. Pengertian *ijarah* menurut para ulama yaitu:

a. Menurut ulama Hanafiyah

الْإِجَارُ هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَا حَةً قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْأَبَا حَةً بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan”.

b. Menurut ulama Malkiyah

الْإِجَارُ تَمْلِيْكٌ مَّنَا فَعِ شَيْءٍ مُّبَا حَةً مُدَّةً مَّعْلُومَةً بِعَوَضٍ

¹Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 114.

Artinya:“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”²

Menurut Syafi’i Antonio dalam bukunya. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*malkiyyah*) atas barang itu sendiri.³

Menurut Ahmad Azar Basyir dalam buku *waqaf, al-ijarah syirkah* mengemukakan. *Ijarah* secara bahasa yaitu balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah (*ujrah*) atas pekerjaan atau jasa yang telah di sepakati. Secara istilah *ijarah* berarti sesuatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu binatang, benda atau jasa atas tenaga manusia. Misalnya menyewa kost-kostan untuk tinggal, menyewa alat bajak untuk membajak sawah, menyewa jasa manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dan sebagainya.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.⁴ Dengan demikian, dalam *ijarah* tidak hanya barang yang dapat menjadi objek *ijarah* tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek *ijarah*, tetapi hanya terjadi

²A. Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 133.

³Muhammad Syafi’i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT Gema Insani, 2001), h. 177.

⁴Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

pemindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa.⁵

Menurut bahasa (*etimologi*), upah berarti imbalan atas pengganti. Sedangkan menurut (*terminologi*), upah adalah mengambil manfaat tenaga atau jasa dari orang lain dengan jalan memberi imbalan atas syarat-syarat tertentu.⁶

Upah (*ujrah*) adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerjaan kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.

Ujrah merupakan salah satu rukun *ijarah*. *ujrah* yang berarti upah atau imbalan terhadap manfaat yang diterima oleh *musta'jir*. Dalam kitab *al-bada'i al-sana'i* dijelaskan bahwa syarat *ujrah* yaitu:

- a. *Ujrah* harus bernilai dan diketahui.
- b. *Ujrah* tidak boleh dalam bentuk manfaat yang sama dengan manfaat yang diterima oleh *musta'jir*.

⁵Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2014), h. 264.

⁶A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 187.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dalam literatur fiqih, pembahasan tentang *ijarah* dan perinciannya mendapatkan fokus yang besar dikalangan *fuqaha*, karena akad tersebut sangat relevan dalam menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam suatu objek yang pemanfaatannya dan transaksinya berorientasi ke *profit*. *Ijarah* dan jual beli termasuk pertukaran. Akan tetapi *Ijarah* merupakan pertukaran harta dengan manfaat. Karena definisi yang demikian maka para ulama menjelaskan bahwa *ijarah* adalah jual beli manfaat barang:

karena definisi jual-beli adalah pertukaran harta dengan barang, oleh karena itu *ijarah* merupakan bagian dari jual beli.

a. Al-Qur'an

Dalil Al-Qur'an mengenai *Ijarah* adalah QS.al-Thalaq (65): ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَى ۖ

Artinya :Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)

dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁷

Al-qur'an surah *al-Qashash* (28): ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ اسْتَعْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْجٍ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Salah seorang dari wanita itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (padakita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu'aib): “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini. Atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan bila kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberatikanmu. Dan kamu insyaallah akan mendapatiku orang-orang yang baik.”⁸

Al-Quran surat At-Taubat ayat (9) 105, berikut ini:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : dan katakanlah “ bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasull-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu kan dikembalikan kepada {Allah} yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberika-

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor, 2007) h. 559.

⁸ *Ibid.* h. 388.

Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah [9]:105).⁹

b. Hadis dan Kaidah Fiqih

Hadis riwayat ibn Majah dari ibnu umar bahwa Nabi bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَعَ رَقَةً.

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda :“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”(HR Ibnu Majah).¹⁰

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي (أَيَّ حَلَفَ بِأَسْمِي) ثَوَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَأَسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “ Allah Swt. Berfirman: ‘ada tiga kelompok yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiyamat nanti. Pertama, orang ynag bersumpah atas namaku lalu iya menghiyanatnya. Kedua, oarang yang menjual orang yang merdeka (bukan budak belian (lalu dia memakan (mengambil) keuntunganya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibanya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya”(HR. Muslim).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُحْلِلْهُ أَجْرَهُ.

Artinya : Abu Bakar meriwayatkan dari Waki, dari sufyan, dari Hammad, dari ibrahim, dari Aby Hurairah dan Aby sa'id r.a, berkata:

⁹Ibid. h. 203.

¹⁰ Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale And Lease Back. h. 1.

barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.
(HR. Abd al-Razaq).¹¹

c. Ijma ulama

Dalam kitab fiqih *al-Muamalat* yang diterbitkan oleh universitas Madinah, dijelaskan bahwa ulama atau ahli ilmu dari beberapa periode dan berbagai tempat sepakat tentang bolehnya akad *ijarah*.

Hukum melakukan akad *ijarah* sama dengan hukum melakukan akad *mu'amalah maliyyah* pada umumnya yaitu boleh. Adapun argumentasinya beragam, baik argumen dalam kitab al-Quran, hadis Nabi Saw., maupun *ijma'*.

Wabih al-zuhaili, dalam bukunya menjelaskan tentang adanya *ijma al-ummah* (bukan *ijma ulama*) pada zaman sahabat Nabi Muhammad Saw. Mengenai bolehnya akad *ijarah* karena adanya kebutuhan di dalam masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Alasan bolehnya melakukan akad *ijarah* yaitu sama dengan alasan dibolehkannya akad jual beli.¹²

Dikarenakan hukum asal *ijarah* adalah *ibahah* (boleh) maka hukumnya berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Misalnya, hukum menyewa ruko adalah boleh (halal), tetapi menjadi haram apabila ruko tersebut disewa untuk melakukan usaha yang dilarang dalam syariat (misalnya dijadikan tempat penjudian *khamar*).

¹¹ Wabih Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr 2006), h. 382

¹² *Ibid.* h. 386.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

- 1) Orang yang menyewakan, dalam hal ini disyaratkan berakal, *baligh* dan atas kehendak sendiri
- 2) Orang yang menyewa, disyaratkan berakal, *baligh* dan atas kehendak sendiri
- 3) Barang dan benda yang disewakan, dalam hal ini dapat disyaratkan sebagai berikut:
 - a) Barang yang disewakan harus tahan lama atau kekal zatnya.
 - b) Barang yang disewakan harus mempunyai manfaat
 - c) barang yang disewakan bukan termasuk barang yang haram atau barang yang dilarang oleh Agama.
 - d) Barang harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya.
 - e) Barang yang disewakan dapat diserahkan oleh pemilik barang kepada penyewa
 - f) Imbalan sebagai bayaran (uang sewa/ upah (*ujrah*)) , dalam hal ini disyaratkan sebagai berikut:
 - (1) Diketahui jumlah bayaranya / *ujrah* atas sewa-menyewa.
 - (2) Bisa membawa manfaat yang jelas.
 - (3) Tidak berkurang nilainya.
 - g) *Shiqat* (ijab qobul) atau akad *ijarah* (perjanjian) dalam hal ini dapat disyaatkan.

- 1) Dalam akad (perjanjian) harus ditentukan waktu sewanya, apakah sehari, seminggu, sebulan ataupun setahun.
- 2) Akad (perjanjian) harus dilakukan sebelum barang yang disewa itu dipergunakan atau dimanfaatkan.
- 3) *Ijab kabul* tidak disangkut pautkan dengan urusan-urusan yang lain, yakni antara penyewa dan yang menyewakan.¹³

b. Syarat sah *Ijarah*

Syarat sah yang berlaku pada *ijarah* sebagai berikut:

- 1) *Ijarah* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak *tasharuf* (membelanjakan harta).
- 2) Manfaat dapat diketahui, seperti menempati rumah, melayani seseorang mengerjakan sesuatu ilmu dan lain sebagainya.
- 3) Diketahui upahnya.
- 4) Manfaat dalam *ijarah* adalah *mubah*, tidak sah manfaat yang haram.¹⁴

4. Prinsip-Prinsip *Ijarah*

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan pada prinsip pengupahan, Agama Islam mengenal beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan upah adalah sebagai berikut:

¹³Chairuman Pasaribu Dan Suharwadi, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 56.

¹⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 197

1. Prinsip Keadilan

Sudah selayaknya pengusaha untuk memberikan upah yang adil. Oleh karena itu, seorang buruh berhak menuntut upah kerja yang seimbang dan sah tanpa harus mengintimidasi atau merugikan pihak lain.¹⁵

Dalam pengupahan terapat dua prinsip keadilan yang harus ada dalam prinsip pengupahan, yaitu:

1. Prinsip keadilan Distributif adalah suatu prinsip yang menuntut seorang buruh untuk melakukan suatu pekerjaan yang sama.
2. Prinsip keadilan harga kerja adalah sebuah prinsip pengupahan yang menuntut pengusaha memberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang telah diberikan.¹⁶

Prinsip Keadilan dalam pengupahan telah di syari'atkan dalam

Al-Quran surah *al-Maidah* (5) ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ

إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan

¹⁵ Abdul Khakim. *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2003* (Bandung : Citra Aditya Bakti. 2006), h. 221

¹⁶ *Ibid.* h. 222.

haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum yang telah dikehendaki-Nya” (Q.S *al-Maidah*(5):1) ¹⁷

Dalil diatas menjelaskan prinsip utama dalam pengupahan adalah prinsip keadilan yang mana terletak pada kejelasan akad. Sehingga pada saat melakukan suatu perjanjian kerja, selayaknya seorang mu’jir ataupun mustajir harus mengetahui besaran upah, dalam tata cara pembayaran upahnya.¹⁸

2. Prinsip Kelayakan

Sudah seharusnya upah kerja diberikan secara layak, yaitu memenuhi kebutuhan minimum secara layak. Oleh karena itu, penting menerapkan prinsip kelayakan dalam pengupahan.

A adapun kata layak disini bermakna sebagai berikut:

- 1) Bermakna mampu mencukupi sandang pangan dan papan.
- 2) Bermakna sesuai dengan pasaran yaitu seorang pengusaha maupun buruh dilarang untuk merugikan orang lain yaitu dengan cara mengurangi hak orang lain. Contoh memberi upah jauh di bawah upah yang biasanya diberikan.¹⁹

3. Prinsip Kebijakan

Dalam sebuah perjanjian, kedua belah pihak harus bersikap jujur dan adil dalam urusan (bijak). Hal tersebut adalah bentuk upaya untuk menjauhkan dari perbuatan aniya dan merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk mempertahankan suatu upah

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h.106.

¹⁸ Rustam Evendi. *Produksi Dalam Islam*...., h 42

¹⁹ *Ibid.* h.41

dalam standar minimum, islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (akad). Kata bebas disini adalah baik pengusaha maupun buruh bebas mencari kehidupan dimana saja dengan tidak memaksa buruh untuk bekerja pada suatu perusahaan tertentu saja, melainkan bebas jika waktu-waktu ingin mencari pekerjaan.²⁰

5. Macam-Macam *Ijarah*

Akad *ijarah* bergantung pada objeknya dapat terbagi menjadi dua macam yaitu *ijarah ain* dan *ijarah 'amal*.

a. *Ijarah ain*

Ijarah ain adalah jenis *ijarah* yang berkaitan dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu, tanpa memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain yang dipindahkan hanya *manfaah*(manfaat). Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *muajirdan* penyewa yaitu *mustajir* dan harga untuk memperoleh manfaat disebut *ujrah*. Pada *ijarah ain* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang mempunyai nilai kemanfaatanya atau yang dapat diambil manfaatnya. Contohnya seperti sewa-menyewa toko, sawah, kos-kosan dan lain lain.

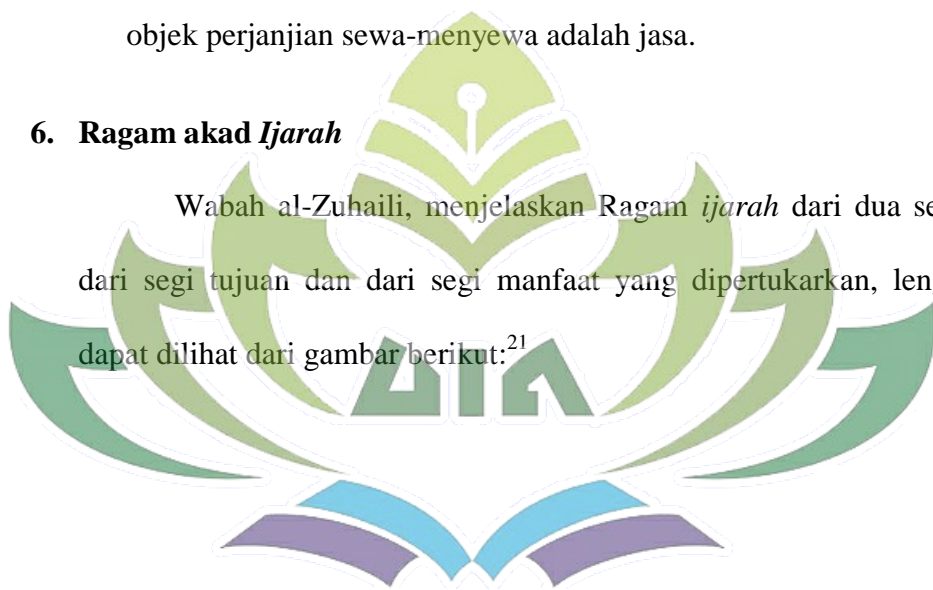
b. *Ijarah 'amal*

²⁰Afsur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 2002), h. 368

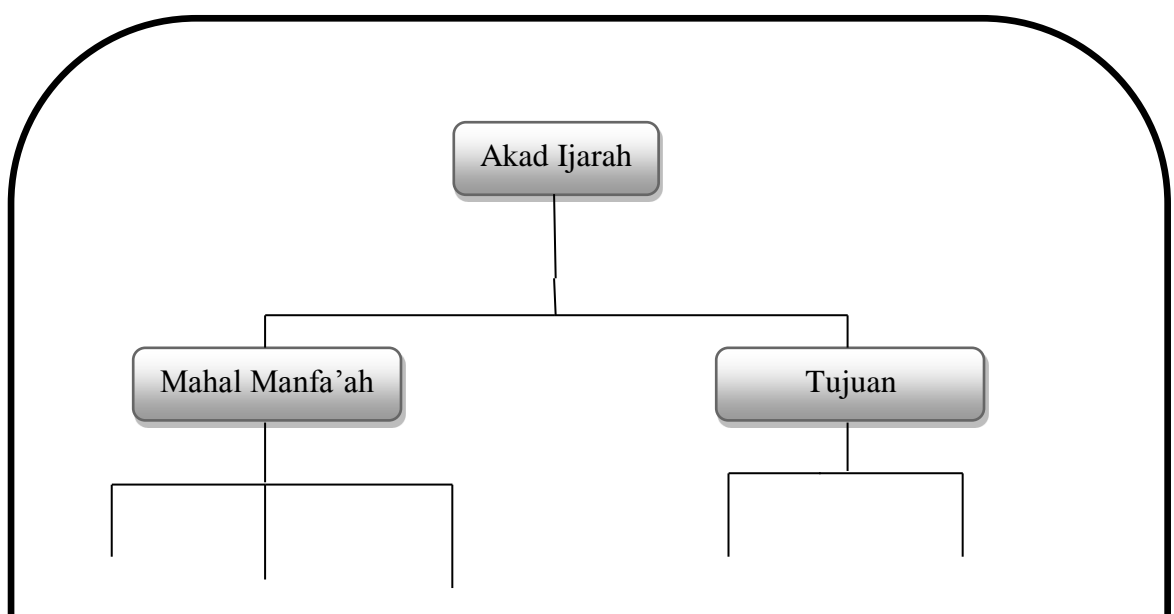
Ijarah 'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar *ujrah* (upah) atas jasa yang diperoleh. Penggunaan jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*. *Ijarah* atas pekerjaan atau jasa disebut juga upah mengupah. *Ijarah 'amal* bersifat pekerjaan yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan seperti tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, pemanen padi dan lain-lain. Dengan demikian pada *ijarah 'amal* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah jasa.

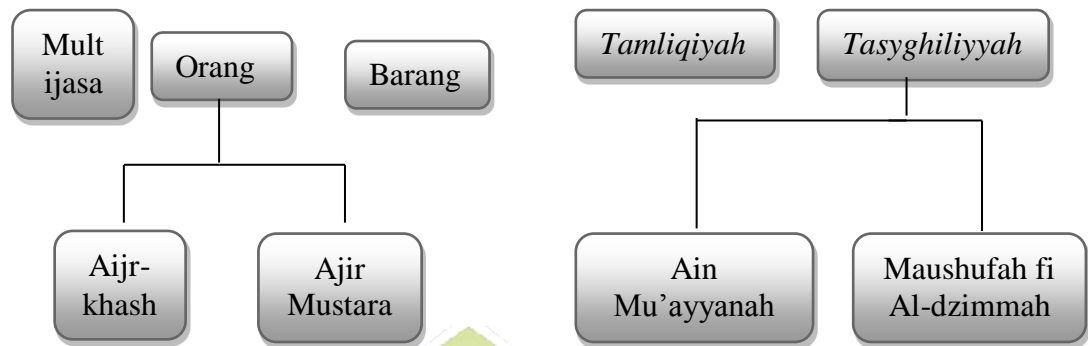
6. Ragam akad *Ijarah*

Wabah al-Zuhaili, menjelaskan Ragam *ijarah* dari dua segi yaitu dari segi tujuan dan dari segi manfaat yang dipertukarkan, lengkapnya dapat dilihat dari gambar berikut:²¹



Gambar 1
Ragam *Ijarah*





Keterangan :

- Dari segi *mahal al-manfa'ah*, *ijarah* dibedakan menjadi tiga yaitu: *ijarah* atas manfaat barang, *ijarah* atas tenaga/keterampilan atau keahlian manusia, dan *ijarah* atas barang dan orang (*multijasa*).
- Ijarah* atas keahlian manusia dibedakan menjadi dua yaitu *ijarah* atas pekerjaan yang bersifat khusus (dilakukan oleh *ajir-khas*) dan pekerjaan yang bersifat umum (dilakukan oleh *ajir Musytarak*).

- c. Dari segi tujuan, *ijarah* dibedakam menjadi dua, yaitu *ijarah tamlikiyyah (al'adiyah)* dan *ijarah tasyghiliyyah*.²²

7. Pembayaran *Ijarah*

Awal pembayaran *ujrah* dapat dilakukan dengan cara tunai (*naqd* atau *hall*) dan tangguh (*ta'jil* atau *muajjal*). Sedangkan dalam literatur fiqih kontemporer, dikenal pula dengan cara pembayaran harga atau *ujrah*, yaitu bertahap atau berangsur-angsur. Cara ketiga ini sangat masyhur dalam pembayaran harga atau *ujrah*.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *ujrah* dapat dilakukan karena salah satu dari tiga sebab berikut.

- a. Disepakati dalam akad atau perjanjian *ijarah* bahwa *ujrah* harus dibayar secara tunai (*naqd* atau *hall*). Argumennya adalah hadis riwayat imam al-bukhari. Rasulullah SAW. Bersabda

اَلْمُسْلِمْنَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

Artinya: “umat islam terikat dengan syarat yang disepakatinya”

- b. Keridhaan (sukarelanya) *musta'jir* membayar *ujrah* secara tunai karena karena prinsipnya *musta'jir* berhak membayar *ujrah* secara tangguh. Dalilnya adalah *qiyas* (analogi) pada akad jual beli, yaitu bolehnya pembayaran harga (*tsaman*) dalam akad jual beli secara tunai (*naqd* atau *ta'jil*)

²² *Ibid.* h. 17

- c. Mulai dimanfaatkan *mahal al-manfa'ah* oleh *mustajir* secara bertahap atau *mu'jir* memberi hak kepada *musta'jir* untuk memanfaatkannya. Diantara indikatornya dipegangnya atau dikuasainya kunci (misalnya atas sewa rumah atau kendaraan) oleh *musta'jir*.

Selain ketiga sebab tersebut pada dasarnya *muajir* dan *mustajir* boleh melakukan kesepakatan bahwa *ujrah* tidak wajib dibayar, kecuali telah habis masa sewanya. Argumennya adalah analogi pada bolehnya pembayaran harga secara tangguh pada akad jual-beli.

Apabila waktu dan/atau cara pembayarannya *ujrah* bukan merupakan bagian kesepakatan dalam perjanjian, ulama berpendapat sebagai berikut:

- a. Abu Hanifah (dalam *qaul qodim*) , yang juga merupakan pendapat Zufar, berpendapat bahwa *ujrah* tidak wajib dibayar, kecuali setelah berakhirnya masa sewa.
- b. Abu Hanifah (dalam *qaul qadid*) yang merupakan pendapat abu yusuf dan muhamad al-syabani. Menyatakan bahwa *ujrah* wajib dibayar tunai setelah manfaatnya diterima (baik harian/mingguan/ bulanan sesuai kesepakatan atau *istihsan*)
- c. Ulama Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ujrah* wajib dibayar secara tunai (pada saat atau majelis akad) apabila akad *ijarah* yang dilakukan termasuk akad *ijarah fi al-dzimmah* (dibahas pada bab/bagian khusus).

Waktu pembayaran *ujrah* (kapan *ujrah* wajib dibayar oleh *musta'jir* kepada *muj'ir*) pada prinsipnya sesuai kesepakatan, apakah *ujrah* disepakati pembayarnya pada saat akad (tunai pada majelis akad), pada saat *ijarah* selesai. Apabila waktu pembayaran *ujrah* tidak ditentukan dalam akta perjanjian bukan bagian dari kesepakatan), ulama ikhtilaf. Zufar berpendapat bahwa *ujrah* wajib dibayar pada akhir masa sewa, sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad al-Syibani berpendapat bahwa *ujrah* wajib dibayar setelah manfaat diterima oleh *musta'jir* (bertahap sesuai kebiasaan).²³

Kreteria pembayaran *ujrah* berkaitan dengan dua kondisi yaitu *ijarah* atas barang (sewa barang) dan *ijarah* atas orang (upah). Dalam menjelaskan kreteria pembayaran *ujrah* atas sewa barang, ulama berpendapat bahwa *ujrah* wajib dibayar oleh *musta'jir* karena akad *ijarah* dan pengasaan *mahal al-manfa'ah* (penggunaan atau pemanfaatan *mahal al-manfa'ah* bukan syarat pembayaran *ujrah*).

Dalam akad *ijarah* akan terjadi sebuah kondisi, misal ketika *musta'jir* sudah melakukan akad *ijarah* dengan *muj'ir* atas kendaraan roda empat untuk melakukan wisata selama tiga hari untuk melakukan. Kendaraan roda empat dapat diserahkan terimakan, tetapi tidak jadi digunakan karena alasan tertentu. Meskipun tidak dipakai untuk melakukan perjalanan *musta'jir tetep* harus membayar *ujrah* karena akad *ijarah* yang dilakukan serta penguasaan atas *mahal al-*

²³ Jail Mubarak. *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah....*, h. 33.

manfa'ah, meskipun tidak menerima manfaatnya sebagai bandingan atas *ujrah* yang dibayarnya.

Pembayaran *ujrah* (upah) dalam *ijarah* atas jasa prinsip dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. *Ajir khash* (pekerja khusus) yang berhak memperoleh *ujrah* karena perjanjiannya
2. *Ajir Musytarak* (pekerja umum atas dasar akad *ijarah ammah*) yang berhak atas *ujrah* atas dasar perjanjian *ijarah* serta dilakukannya perjanjiannya.

Ketentuan ini adalah ketentuan yang bersifat umum adapun ketentuan yang lebih terperinci diatur dan disepakati dalam akta perjanjian atau berdasarkan *urf* yang berlaku di masyarakat.²⁴

8. Pembagian *Ujrah* Dalam Persepektif Hukum Islam

a. Sistem pengupahan dalam Islam

Menentukan perkiraan upah (*ujrah*) dalam Islam yaitu disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja, apabila terjadi suatu perselisihan diantara keduanya tentang *ujrah* yang telah disepakati atau telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka peraturan perkiraan tersebut bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah kerja, ahli yang dapat menentukan besarnya upah ini disebut *kaiubara'u*. hal ini dilakukan

²⁴ Jail Mubarak. *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah...*, h. 81.

kalau memang diantara kedua belah pihak belum ada kesepakatan yang dibuat tentang pengupahannya. Menentukan upah bagi seorang dengan adil bukanlah perkara mudah, permasalahan teletak pada ukuran apa yang dipergunakan, yang dapat membantu mentransformasikan konsep upah (*ujrah*) yang adil kedalam dunia kerja.²⁵

Kesulitan ini pernah dialami oleh sahabat ketika menetapkan upah Khalifah Abu Bakar dengan standar yang mencukupi kehidupan seorang muslim golongan menengah. Penetapan upah seperti ini masih samar, dan Abu Bakar kemudian mengusulkan “sesungguhnya saya adalah pedagang maka ukurlah itu dengan dirham...” usulan ini diterima dan sahabat menetapkan 12 dirham perhari, sesuai dengan ketentuan hadis Nabi tentang pelaksanaan membayar upah yang diriwayatkan oleh Abu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Hurairah dimana hadis tersebut memberikan petunjuk agar upah segera dibayar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَعَ رَقَةً.

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda :“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”(HR Ibnu Majah: 397).

Pandangan imam Al-Maliki yang mendasarkan upah pada jasa atas manfaat, menimbulkan beberapa implikasi, yaitu:

²⁵Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,....h.130.

- a. Penentuan upah tidak boleh dikaitkan dengan harga-harga barang yang dihasilkan pekerja
- b. Tidak diperbolehkan membangun transaksi jual-beli, karena akan berakibat pada penentuan harga. Harga kebutuhan didasarkan kepada upah seorang *ajir*.
- c. Mengaitkan antara kesejahteraan seseorang *ajir* dengan hasil kerjanya, tidak diperbolehkan.
- d. Tidak boleh menentukan upah berdasarkan tingkat kehidupan masyarakat tertentu.

Menurut al-Maliki, hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja. Ia menegaskan “transaksi jual beli itu berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi jual beli tersebut. Begitu juga dengan dengan *ijarah* sewa-menyewa atau *ijarah* atas jasa itu berlangsung atas kerelaan antara *ajir* dan *mustajir*. Jika keduanya telah sepakat atas suatu upah, serta upah tersebut telah disebutkan (*al-Ajru al-Musamma*), maka keduanya telah terikat atas apa yang telah dikatakan.

Salah satu topik penting dalam memahami dan mendalami akad *ijarah* adalah bagaimana metode penentuan *ujrah*, diskusi ini mirip dengan cara penentuan harga (*tsaman*) dalam jual beli, karena karena harga adalah lawan/pasangan dari *mustaman*, sedangkan *ujrah* adalah pasangan dari manfaat.

Pada dasarnya jumlah upah yang harus dibayar oleh *mustajir* kepada *mu'jir* ditentukan atas kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- 1) *Musawamah* (tawar-menawar) yaitu *ujrah* melalui proses musawamah antara *mu'jir* dan *mustajir* dengan mempertimbangkan fungsi, lokasi, kualitas manfaat yang diharapkan, serta kemudahan fasilitas untuk akses ke publik seperti jaringan listrik, telepon, air dan sebagainya. Salah satu prosesnya *ujrah* ditentukan secara perbandingan.
- 2) *Syibh al-musawamah* (semi tawar menawar), yaitu *ujrah* ditentukan oleh *mu'jir*, sedangkan pihak *mustajir* atau *ajir* memiliki hak pilih (*khiyar*) untuk menyetujui (menyepakati) atau menolaknya (atau sebaliknya) jika menolak berarti tidak terjadi akad.²⁶

9. Mahal Al-Manfa'ah dan Cara Pemanfaatannya

Salah satu hal terpenting dalam akad *ijarah* adalah *mahal al-manfa'ah*. Eksistensinya diakui dalam akad *ijarah*, tetapi tidak termasuk kedalam akad *ijarah*. *Maqud alaih* (objek) akad *ijarah* adalah manfaat dan *ujrah* karena akad *ijarah* merupakan akad yang menyebabkan berpindahan kepemilikan manfaat barang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *mahal al-manfa'ah* penting dilakukan untuk diketahui barasan-batasannya.

²⁶Jail Mubarak. *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah....*, h. 36.

Mahal al-manfa'ah dalam kepemilikan kata/bahasa Indonesia sebaliknya disebut barang sewa. Dalam pembahasan ini akan didiskusikan mengenai dua topik, yaitu:

a. *Syarat Mahal Al-Manfa'ah*

Konsep akad *ijarah* adalah jual-beli manfaat atau pertukaran harta dan manfaat. Oleh sebab itu, ulama sepakat bahwa benda atau barang yang bersifat *isti'mali* (tidak habis sekali pakai) dapat dijadikan *mahal al-manfa'ah*.

Syarat *mahal al-manfa'ah* dalam akad *ijarah* adalah harus harta yang dapat dan boleh dimanfaatkan serta kekal zatnya. Oleh karena itu, benda yang tidak kekal karena diambil manfaatnya tidak boleh dijadikan *mahal al-manfa'ah*. Berkaitan tentang syarat ini, Syekh Hasan Ayub memerincikan hal-hal berikut:

- 1) Tidak sah menyewa makanan-minuman dan lilin untuk dibakar agar jadi alat penerang ruangan, karena akad *ijarah* merupakan jual beli manfaat (bukan barang atau *mahal al-manfa'ah*). Sehingga rusaknya *mahal al-manfa'ah* karena diambil manfaatnya berarti *mujir* kehilangan bendamiliknya, karena pengambilan manfaat yang dilakukan *musta'jir*.
- 2) Tidak boleh menggabungkan akad *ijarah* dengan akad jual-beli pada satu benda dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dilarang melakukan *ijarah* atas lilin dengan kesepakatan bahwa bagian lilin

yang terbakar dibayar dengan akad jual-beli dan sisanya (lilin yang tidak terbakar) dijadikan *mahal al-manfa'ah* akad *ijarah*. kedua akad tersebut merupakan akad *fasid*.

3) Lilin disewa untuk dijadikan pemandangan agar ruangan terlihat indah (lilin sebagai pajangan saja) karena manfaat lilin bukan untuk hiasan. Penggunaan lilin sebagai hiasan bukan termasuk manfaat secara *syar'i*. Karenanya, konsumsi atau penggunaan *ujrah* atas lilin sebagai hiasan termasuk konsumsi harta secara *gharar* (*akl al-mal bi al-bathil*). Larangan ini sama dengan larangan *ijarah* atas roti untuk dilihat (dipajang).

4) Tidak sah akad *ijarah* atas makanan yang difungsikan atau dimanfaatkan dalam rangka memperindah (ruangan atau meja untuk penyajian) makanan pokok dalam penyajian karena manfaat makanan secara *syar'i* bukan hiasan (untuk memperindah [mujamalah]) ruangan.

Syarat sahnya akad *ijarah* mengenai kejelasan objek yang diambil manfaatnya berkaitan dengan *gharar*. Beberapa ulama berpendapat bahwa objek *ijarah* adalah barang yang disewakan (misalnya ruko) dan *ujrah*nya (bayar sewa). Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa objek akad *ijarah* adalah manfaat benda yang disewakan (manfaat ruko) dan *ujrah*nya. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat adalah yang kedua (pemanfaatan ruko). Secara implisit menunjukkan objek *ijarah* terbagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Mahal al-manfa'ah (misalnya ruko)
- 2) Manfaat (misalnya manfaat yang dapat diambil dari ruko)
- 3) *Ujrah* (bayaran sewa)

Akad *ijarah* merupakan akat pertukaran, yaitu mempertukarkan manfaat barang sewa atau jasa manusia dengan *ujrah*. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai syarat-syarat manfaat dalam akad *ijarah*. Kejelasan manfaat akad *ijarah* yaitu:

a. Jenis Pekerjaan *Ajir* dan Penggunaan Barang Sewa

Kejelasan jenis pekerjaan dalam akad *ijarah* antara mujir dan ajir adalah syarat sah akad. Pekerjaan *ajir* harus disepakati, apakah pekerja sebagai sopir, penjahit, pemanen padi, pembajak sawah atau penjaga ruko. Apabila tidak jelas apa yang harus dikerjakan, maka akad *ijarah* tidak sah.

Dalam akad *ijarah* harus ditentukan (dijelaskan) dasar perhitungan *ujrah* bagi *ajir* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan yang dibuat. Apakah dasar penetapan *ujrah* bagi ajir adalah lama bekerjanya (harian atau bulanan) atau berdasarkan selesainya satuan pekerjaan (misalnya penjahit mendapatkan *ujrah* 30 ribu rupiah dari setiap potong baju yang diselesaikan) atau boleh juga didasarkan oleh keduanya.

Hal yang kurang lebih sama berlaku juga dalam akad *ijarah* atas barang (misalnya penyewaan kendaraan roda empat atau truk). Harus jelas pembiayaan *ujrah*nya, apakah truk disewa dan

disepakati ujahnya berdasarkan satuan waktu (harian, mingguan atau bulanan) ataukah truk disewa untuk pengangkutan gramen dari Lampung ke Jakarta (prestasi yang diharapkan adalah sampainya garment di Jakarta) ataukah boleh didasarkan pada keduanya.

Dalam hal praktik, akad *ijarah* harus jelas tujuannya, apakah tujuannya bersifat totalitas (dikenal dengan istilah kerja borong) atau bersifat persial (kerja harian) dalam hal *ijarah* atas pekerjaan *ajir*. Begitujuga *ijarah* atas barang, harus jelas juga tujuannya. Apakah kendaraan disewakan secara harian, (seperti penyewaan bus wisata) atau disewakan untuk mengangkut barang ketempat tertentu (seperti truk mengangkat pasir) masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan.²⁷

Dapat dijelaskan lagi didalam fiqh muamalah, terdapat beberapa jenis pengupahan. Adapun macam-macam pengupahan yaitu:

a. Upah Harian

Upah harian adalah upah yang diberikan berdasarkan waktu penyewaan atau suatu pekerjaan. Seperti contoh apabila penyewaan mobil truk dalam satu hari yaitu waktunya 24 jam itu adalah upah bayar sewa, dan apabila upah pekerjaan atau

²⁷*ibid.*h. 40.

jasa. seperti petani, pekerja bangunan waktu yang diberikan dari pagi hari hingga sore hari yaitu upah atas jasa.²⁸

b. Upah Bulanan

Upah bulanan merupakan upah yang akan diberikan atas perjanjian pekerjaan yang waktunya dilakukan setiap bulan

c. Upah Borongan

Upah borongan merupakan macam-macam upah yang didasarkan pada penyelesaian suatu pekerjaan atau banyaknya hasil pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Upah borongan tidak menentukan waktu atau lama untuk menyelesaikan pekerjaannya.²⁹ Dalam fiqh muamalah bisa dikenal dengan akad *ijarah* ataupun *ju'alah*, jualah secara bahasa *ju'alah* adalah janji untuk memberikan imbalan (*al-ju'alah aw al-wa'd bi ja'izah*) kepada pihak lain apabila mencapai hasil *natijah* tertentu. Pekerja tidak berhak mendapatkan imbalan jika tidak mencapai *natijah* secara sempurna. Akad *ju'alah* termasuk akad pertukaran, didalamnya terdapat pertukaran antara *al-jul* (imbalan) dan *al-natijah* (pencapaian [prestasi] tertentu).

²⁸Marzuki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajakan Sawah di desa Alsem Pacitan*, *Al-Adalah*, Vol.14 No.2, h. 197

²⁹*Ibid.* h. 198.

Adapun pengertian *ju'alah* secara istilah yang dijelaskan para ulama antara lain:

1. Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* dijelaskan bahwa istilah *ju'alah* yaitu:

“Komitmen untuk memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu yang sulit ilmunya”.

2. Dalam buku *al-Qawanin al-fiqhiyah*. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa arti *jualah* secara istilah adalah “*jualah* adalah (akad) sewa atas pekernyaan yang diduga dapat tercapai hasilnya”

Pekerja *ajir* atau penggunaan barang sewa harus jelas dalam perjanjian *ijarah* karena beberapa pertimbangan berikut:

1. Seorang muslim tidak boleh menyewakan rukonya untuk menjual barang-barang haram, baik haram secara syariah, membahayakan masyarakat umum atau menyalahi peraturan perundang-undang (misalnya penjualan minum-minuman keras, ganja dan narkoba jenis lainnya)
2. Seorang tidak boleh menjadi konsultasi atau penasihat hukum atas perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai syariah (misalnya konsultasi lembaga keuangan *ribawi*).
3. *Ajir* harus mengetahui apa yang dibawanya, misalnya setiap pengiriman barang melalui jasa ekspedisi selalu dituliskan jenis barang yang dibungkus, agar *ajir* tidak melakukan perbuatan salah

karena ketidak tahuanya (*gharar* dari sisi *ajir*), misal menjadi kurir narkorba.

10. Hak dan Kewajiban Pekerja

Dalam Al-Qur'an menjelaskan mengenai hak para pekerja tidak dijelaskan secara tekstual. Walaupun demikian. Ketentuan-ketentuan secara umum yang mengisyaratkan kepada pihak mujir untuk memberikan hak dan kewajiban terhadap pekerja atau buruhnya. Hak dan kewajiban harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik pekerja maupun majikan. Adapun hak dan kewajiban pekerja adalah sebagai berikut:

a. Hak pekerja

1. Pekerja berhak menerima atau memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan atau skill pekerja.
2. Pekerja berhak untuk menerima upah atau pembayaran secara terhormat yaitu sesuai dengan kesepakatan (*'ajir Khas*) dan batas minimum pembayaran upah, yang mana hak atas upah ditentukan pada kehadiran para pekerja untuk melakukan pekerjaan yang telah diperjanjikan.

b. Kewajiban Pekerja

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Melakukan pekerjaan dengan tekun, teliti dan cermat.
3. Melakukan pekerjaan secara mandiri atau kelompok sesuai dengan kesepakatan yaitu akad atau perjanjian.

11. Berakhirnya pengupahan (*Ijarah*)

Berakhirnya akad *ijarah* apabila telah terpenuhinya seluruh pekerjaan atau prestasi dalam suatu perjanjian atau dalam akad. Adapun yang menjadi penyebab berakhirnya pengupahan atau berakhirnya akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Terjadi aib (kecacatan) pada barang sewaan. Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa, terjadi kerusakan ketika sedang berada ditangan penyewa.
- b. Berakhirnya akad *ijarah* dikarenakan telah terpenuhinya suatu perjanjian. Akan tetapi apabila mu'jir dan musta'jir ingin melanjutkan kembali perjanjian tersebut maka hukumnya boleh, dengan syarat melakukan akad seperti diawal perjanjian kerja.
- c. Waktu akad belum selesai tetapi dari kedua belah pihak memutuskan dan ikhlas untuk menghentikan perjanjian.
- d. Penyewa tidak mampu membayar sewa kepada penjewa.³⁰

B. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis pada saat ini, terdapat beberapa karya ilmiah seperti artikel, jurnal ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas sistem ataupun peraktek pengupahan yang terjadi dimasyarakat. Oleh karena itu, penulis dalam penulisan sekripsi ini melakukan kajian pustaka

³⁰ Suawardi K Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, H. 43

dengan tujuan untuk menambah literatur sebagai bukti telah memahami masalah yang sedang atau akan diteliti.

Adapun yang akan menjadi kajian pustaka adalah skripsi adalah Ahmad Fachul Bahri, 2016 jurusan hukum ekonomi syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan perpanjangan sewa menyewa secara sepihak dari pihak rental di rental mobil semut, jalan stasiun kota surabaya” penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan pola analisis deskriptif. Untuk mengumpulkan datanya menggunakan teknik observasi dan wawancara berdasarkan penelitian yang berada dilapangan perpanjangan sewa menyewa secara sepihak terjadi ketika penyewa mobil rental, terlambat mengembalikan mobil sewanya selama tiga jam dari waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi pada awal akad sewa tidak ada pemberitahuan kalau terjadi keterlambatan dianggap memperpanjang penyewaan mobil. Dan menurut tinjauan hukum islam, perpanjangan secara sepihak tidak diperbolehkan karena terjadi transaksi diluar akad perjanjian, dengan tidak adanya keterlelahan dari kedua belah pihak. Kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh adalah perpanjangan sewa menyewa mobil secara sepihak tidak diperbolehkan, karena dalam syariat islam ada suatu transaksi diluar akad perjanjian sewa menyewa dan tidak

adanya sukarela, antara pemilik rental mobil dengan penyewa, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi penyewa.³¹

Selain itu penulis melakukan kajian pustaka berdasarkan kajian terdahulu yaitu skripsi Eka Agung Maylana.Tahun 2018.UIN Raden Intan Lampung.Tentang “Jual Beli Pupuk Paketan dalam persepektif Hukum Islam. Peneliti ini berfokus pada Sistem Jual Beli Pupuk Paketan Yang Terjadi Pada Sebuah Toko Pupuk Yaitu Toko Pupuk Sapordi Di Desa Uman Agung, Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Dengan Meninjau Dalam Tinjauan Hukum Islan.

Dalam skripsinya Eka Agung Maylana melakukan kajian teori dengan menggunakan teori jual beli dan teori pupuk.Seangkan metode yang dilakukan adalah *field research* yang merupakan sebuah penelitian dengan tujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Adapun sifat penelitian yang dilakukan Eka Agung Maylana adalah menggunakan dekritif normatif , yakni sebuah penelitian yang menggambarkan secara objek. Guna mendeskripsikan pelaksanaan jual beli pupuk secara paketan di desa Umam Agung , Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten lampung Tengah.³²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Eka Agung Maylana tentang jual beli pupuk dengan sistem paketan dianggap

³¹ Ahmad Fatchul Bahri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perpanjangan Sewa Menyewa Secara Sepihak Dari Rental Mobil. Di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya*, (UIN Raden Intan Lampung .2016). h. 87.

³² Eka Agung Maylana, *Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Persepektif Hukum Islam, Studi Kasus Pada Toko Sapordi Di Desa Uman Agung, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah* . (UIN Raden Intan Lampung . 2018).

tidak sesuai dengan hukum islam , karena dalam paketnya terdapat unsur paksaan dimana pembeli harus membeli pupuk yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, sehingga dari keterpaksaan tersebut akan mengakibatkan ketidak relaan dalam transaksi jual beli di toko Sapordi Di Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan kajian pustaka, penulis menemukan keterkaitan teori sebagai sebuah literatur antara skripsi Ahmad Fachul Bahri dan Eka Agung Maylana yang akan digunakan dalam skripsi penulis yang berjudul Penetapan Upah Hasil Panen Padi Dengan Sistem Bagi Delapan Dalam Tinjauan Hukum Islam di desa Wono Agung, Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. Dalam kajian teori penulis menemukan teori *ijarah, ujah dan jualah*. Teori-teori itu sangat erat kaitanya dengan teori-teori yang digunakan oleh skripsi Ahmad Fachul Bahri dan Eka Agung Maylana yang memberikan penjelasan mengenai akad *ijarah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad,, *Hukumdan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adaya Bakti, 2004.
- Al-Zuhaili Wahbah. *Al-Fiqih Al Islami Wa Adilatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006
- AlhafidzAhsin W, *Kamus Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori kepraktek*, Jakarta: PT. Gema Insani, 2001.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djami Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2008 *Tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale And Lease Back*.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (FiqhMuamalah)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Hendi Suhend, *FiqhMuamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ismail Muhamad Yusantoso Dan Muhamad Karbed Widajajajkusuma, *Metode Study Islam*. Jakarta: Gema Insani.2002
- Ja'far, A.Khumedi, *Hukum Perdata Isalam Di Indonesia*, IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Mubarak Jaih. *Akad Ijarah dan Ju'alah*. Jakarta : Simbiosis Rekatama Media, 2017.

Muhammad, *Managemen keuangan syariah Analisis fiqih dan keuangan*
Yogyakarta: UPP YKPM, 2014.

Pasaribu Chairuman Dan Suharwadi..*Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1994

Salim, *Hukum Kontrak Perjanjian Pinjaman dan Hibah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Sjahdeini Sutan Remy,*Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadia Group,2011.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif* ,Bandung, Alfabeta.2013.

Syafe'i Rachman, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqih*, Cetakan ke Satu, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu,1997.

JURNAL:

Agung Eka Maylana, *Jual Beli Pupuk Paket Dalam Persepekif Hukum Islam, Studi Kasus Pada Toko Saprodi Di Desa Uman Agung, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah* . UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Fatchul Ahmad Bahri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perpanjangan Sewa Menyewa Secara Sepihak Dari Rental Mobil. Di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya*, UIN RadenIntan Lampung 2016

Marzuki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah pembajakan sawah di desa alsempa citan, Al-Adalah*, Vol.14 No.2

WAWANCARA:

AjisNur, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 21 Agustus 2020

Asda, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 21 Agustus 2020.

Agus, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 22 Agustus 2020.

Basri, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 21 Agustus 2020.

Eno, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 21 Agustus 2020.

Jayadi, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 22 Agustus 2020.

Jumandi, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 25 Agustus 2020.

Handini, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 26 Agustus 2020.

Hasim, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 25 Agustus 2020.

Mujito, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 21 Agustus 2020.

Paimo, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 21 Agustus 2020.

Ribut, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 22 Agustus 2020

Somadi, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 21 Agustus 2020.

Sarpudin, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 25 Agustus 2020

Sugeng, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 25 Agustus 2020.

Sutikno, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 22 Agustus 2020.

Sumarni, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 21 Agustus 2020.

Suparpdi, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 21 Agustus 2020.

Ahmadi, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 21 Agustus 2020.

Tamyis, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 22 Agustus 2020.

Yanto, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 25 Agustus 2020.

Wanto, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 25 Agustus 2020.

Wahami, Wawancara dengan penulis, di desa Wono Agung. Kecamatan Rawajitu Selatan. Kabupaten Tulang Bawang. 26 Agustus 2020.

